


LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-02/PJ/2019
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN
DAN PENGOLAHAN SURAT
PEMBERITAHUAN

A. CONTOH FORMAT BUKTI PENERIMAAN SURAT

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA.....	
	LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 130 0200 EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id	
BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)		
Nomor : Tanggal :		
NPWP :	Tanggal Terima :	PETUGAS PENERIMA, (KPP/KP2KP)
Nama :	KPP Terdaftar :	
Jenis Pajak :	Tahun Pajak : - Masa Pajak :	
Status SPT :		
Pembetulan Ke :		

1. Bukti Penerimaan Surat dicetak bersama dengan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD);
2. Bukti Penerimaan Surat diberikan kepada Wajib Pajak dengan ditandatangani oleh Petugas Penerima SPT dan diberikan stempel, sedangkan LPAD disatukan dengan SPT.
3. Bukti Penerimaan Surat dan LPAD minimal berisi informasi nomor LPAD-BPS, Identitas WP (NPWP, Nama WP, KPP Administrasi WP), Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar), Pembetulan, Tahun Pajak, dan Petugas Penerima SPT.

B. CONTOH FORMAT BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK



Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda

Nama :
NPWP :
Tahun Pajak :
Masa Pajak :
Jenis SPT :
Pembetulan ke :
Status SPT :
Nominal :
Tanggal Penyampaian :
Nomor Tanda Terima Elektronik :

Terima kasih telah menyampaikan laporan SPT anda

Bukti Penerimaan ini dianggap sebagai bukti penerimaan sah sepanjang SPT diterima lengkap

1. Bukti Penerimaan Elektronik diberikan kepada Wajib Pajak melalui layanan surel/ *email* Wajib Pajak.
2. Bukti Penerimaan Elektronik merupakan informasi yang meliputi nama Wajib Pajak, NPWP, Jenis SPT, Masa/Tahun Pajak, tanggal, jam, dan Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal penyampaian SPT dalam bentuk dokumen elektronik dilakukan melalui *e-Filing*.
3. Dalam hal SPT disampaikan melalui laman penyalur SPT Elektronik, format Bukti Penerimaan Elektronik menggunakan format yang ditentukan laman penyalur SPT Elektronik dengan paling sedikit memuat informasi NPWP, Jenis SPT, Masa/Tahun Pajak, Status Pembetulan dan NTTE.

C. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN STATUS PENYAMPAIAN SPT



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....(1)

Nomor :(2)(4)
Lampiran :(3)
Hal : Pemberitahuan Status Penyampaian SPT

Yth.
NPWP :(5)
.....

Dengan ini diberitahukan bahwa bukti pengiriman SPT(6) Masa/Tahun Pajak
....(7) dengan:
 nomor :(8)
 tanggal :(9)
bukan merupakan bukti penerimaan SPT karena(10)

Bersama ini pula kami kembalikan SPT/berkas*) yang Saudara sampaikan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

..... (11)

Kp. : KP.xx/KP.xxxx/xxxx

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN STATUS PENYAMPAIAN SPT

- Angka (1) : diisi sesuai dengan format Kepala Naskah Dinas.
- Angka (2) : diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Status Penyampaian SPT.
- Angka (3) : diisi dengan keterangan jumlah SPT/berkas yang dilampirkan.
- Angka (4) : diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Status Penyampaian SPT.
- Angka (5) : diisi dengan Nama, NPWP, dan Alamat Wajib Pajak.
- Angka (6) : diisi dengan jenis SPT.
- Angka (7) : diisi dengan Masa/Tahun Pajak.
- Angka (8) : diisi dengan nomor bukti pengiriman surat melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir.
- Angka (9) : diisi dengan tanggal pengiriman pada bukti pengiriman surat melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir.
- Angka (10): diisi dengan alasan meliputi:
- a. isi amplop bukan SPT Tahunan/Masa namun berupa ...;
 - b. berdasarkan hasil penelusuran dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa atas NPWP Saudara diketahui (tidak tersedia dalam sistem informasi/telah diterbitkan Surat Penghapusan NPWP).Oleh karena itu, dimohon kepada Saudara agar dapat melakukan registrasi atau pendaftaran NPWP sesuai tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Saudara atau melakukan registrasi online di laman www.pajak.go.id;
 - c. berdasarkan data penerimaan SPT Tahunan/SPT Masa Direktorat Jenderal Pajak, Saudara telah menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak ... /SPT Masa masa pajak ...,yang telah kami terima dengan dengan Bukti Penerimaan SPT nomor ... tanggal ...;
 - d. bentuk SPT Tahunan yang Saudara sampaikan tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 - e. berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, Saudara telah memenuhi ketentuan kewajiban penyampaian SPT dalam bentuk elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 3A Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-243/PMK.03/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018;

- f. berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, Saudara telah memenuhi ketentuan kewajiban penyampaian SPT dalam bentuk elektronik melalui saluran tertentu (*e-Filing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-243/PMK.03/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018;
- g. berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-243/PMK.03/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, SPT PPh Pasal 25 atau SPT PPh Pasal 21 yang Saudara sampaikan dalam status Nihil karena tidak ada pembayaran atau pemotongan, tidak lagi wajib disampaikan;
- h. penyampaian SPT Pembetulan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 atau ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
- i. penyampaian SPT Pembetulan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- j. penyampaian SPT Pembetulan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; atau
- k. penyampaian SPT anda dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan penyampaian SPT melalui Pos/Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir dimana setiap SPT yang dikirimkan menggunakan 1 amplop dengan 1 bukti /pengiriman.

Angka (11) : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor.

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

D. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPH PASAL 21/26



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(4)
Lampiran :(3)
Hal : **Permintaan Kelengkapan
SPT Masa PPh Pasal 21/26**

Yth.
NPWP :(5)

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang disampaikan pada tanggal(6) ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

- a. 1721-I;
- b. 1721-II;
- c. 1721-III;
- d. 1721-IV;
- e. 1721-V.

2. Lampiran yang disyaratkan

- a. Bukti pembayaran PPh Pasal 21/26;
- b. *Fotocopy* Surat Kuasa Khusus;
- c. Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili.

3. Lain-Lain

- a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (...)*;
- b. Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan melampirkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT, sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Masa dalam waktu sebagaimana tersebut di atas maka, SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.(7) pada nomor telepon:(8)

Kepala Kantor,

.....(9)

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp. : KP.xx/KP.xxxx/xxxx

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPh PASAL 21/26

- Angka (1) : diisi sesuai dengan format Kepala Naskah Dinas.
- Angka (2) : diisi dengan nomor Surat Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPh Pasal 21/26.
- Angka (3) : diisi dengan keterangan jumlah SPT/berkas yang dilampirkan.
- Angka (4) : diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPh Pasal 21/26.
- Angka (5) : diisi dengan Nama, NPWP, dan Alamat Wajib Pajak.
- Angka (6) : diisi dengan tanggal pengiriman pada bukti pengiriman surat melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir.
- Angka (7) : diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian.
- Angka (8) : diisi dengan nomor telepon kantor dan nomor ekstensi Petugas yang melakukan penelitian.
- Angka (9) : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor.

Keterangan:

*) Diisi dengan pilihan berikut:

1. Kolom identitas tidak diisi lengkap
2. Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
3. Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

E. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPH PASAL 22



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(4)
Lampiran :(3)
Hal : **Permintaan Kelengkapan
SPT Masa PPh Pasal 22**

Yth.
NPWP :(5)

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPh Pasal 22 yang disampaikan pada tanggal(6) ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Lampiran yang disyaratkan

- a. Daftar bukti pembayaran PPh Pasal 22;
- b. Bukti pembayaran PPh Pasal 22 dibayar sendiri;
- c. Bukti pembayaran PPh Pasal 22 dari pemungut;
- d. Daftar bukti pemungutan;
- e. Bukti pemungutan;
- f. Daftar rincian penjualan dan retur penjualan;
- g. Risalah lelang;
- h. *Fotocopy* Surat Kuasa Khusus.

2. Lain-Lain

- a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (....)*);
- b. Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan melampirkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT, sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Masa dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Masa PPh Pasal 22 yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.(7) pada nomor telepon:(8)

Kepala Kantor,

.....(9)

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp. : KP.xx/KP.xxxx/xxxx

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPh PASAL 22

- Angka (1) : diisi sesuai dengan format Kepala Naskah Dinas.
- Angka (2) : diisi dengan nomor Surat Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPh Pasal 22.
- Angka (3) : diisi dengan keterangan jumlah SPT/berkas yang dilampirkan.
- Angka (4) : diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPh Pasal 22.
- Angka (5) : diisi dengan Nama, NPWP, dan Alamat Wajib Pajak.
- Angka (6) : diisi dengan tanggal pengiriman pada bukti pengiriman surat melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir.
- Angka (7) : diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian.
- Angka (8) : diisi dengan nomor telepon kantor dan nomor ekstensi Petugas yang melakukan penelitian.
- Angka (9) : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor.

Keterangan:

*) Diisi dengan pilihan berikut:

1. Kolom identitas tidak diisi lengkap
2. Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
3. Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

F. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPH PASAL 23/26



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(4)
Lampiran :(3)
Hal : **Permintaan Kelengkapan
SPT Masa PPh Pasal 23/26**

Yth.
NPWP :(5)

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPh Pasal 23/26 yang disampaikan pada tanggal(6) ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Lampiran yang disyaratkan

- a. Bukti pembayaran PPh Pasal 23/26;
- b. Daftar bukti pemotongan;
- c. Bukti pemotongan;
- d. *Fotocopy* Surat Kuasa Khusus;
- e. Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili.

2. Lain-Lain

- a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (....)";
- b. Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan melampirkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT, sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Masa dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Masa PPh Pasal 23/26 yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.(7) pada nomor telepon:(8)

Kepala Kantor,

.....(9)

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp. : KP.xx/KP.xxxx/xxxx

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPH PASAL 23/26

- Angka (1) : diisi sesuai dengan format Kepala Naskah Dinas.
- Angka (2) : diisi dengan nomor Surat Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPh Pasal 23/26.
- Angka (3) : diisi dengan keterangan jumlah SPT/berkas yang dilampirkan.
- Angka (4) : diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPh Pasal 23/26.
- Angka (5) : diisi dengan Nama, NPWP, dan Alamat Wajib Pajak.
- Angka (6) : diisi dengan tanggal pengiriman pada bukti pengiriman surat melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir.
- Angka (7) : diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian.
- Angka (8) : diisi dengan nomor telepon kantor dan nomor ekstensi Petugas yang melakukan penelitian.
- Angka (9) : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor.

Keterangan:

*) Diisi dengan pilihan berikut:

1. Kolom identitas tidak diisi lengkap
2. Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
3. Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

G. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPH PASAL 15



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(4)
Lampiran :(3)
Hal : **Permintaan Kelengkapan
SPT Masa PPh Pasal 15**

Yth.
NPWP :(5)

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPh Pasal 15 yang disampaikan pada tanggal(6) ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Lampiran yang disyaratkan

- a. Bukti pembayaran PPh Pasal 15;
- b. Daftar bukti pemotongan;
- c. Bukti pemotongan;
- d. *Fotocopy* Surat Kuasa Khusus;
- e. Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili.

2. Lain-Lain

- a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (....)?;
- b. Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan melampirkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT, sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Masa dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Masa PPh Pasal 15 yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.(7) pada nomor telepon:(8)

Kepala Kantor,

.....(9)

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp. : KP.xx/KP.xxxx/xxxx

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPh PASAL 15

- Angka (1) : diisi sesuai dengan format Kepala Naskah Dinas.
- Angka (2) : diisi dengan nomor Surat Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPh Pasal 15.
- Angka (3) : diisi dengan keterangan jumlah SPT/berkas yang dilampirkan.
- Angka (4) : diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPh Pasal 15.
- Angka (5) : diisi dengan Nama, NPWP, dan Alamat Wajib Pajak.
- Angka (6) : diisi dengan tanggal pengiriman pada bukti pengiriman surat melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir.
- Angka (7) : diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian.
- Angka (8) : diisi dengan nomor telepon kantor dan nomor ekstensi Petugas yang melakukan penelitian.
- Angka (9) : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor.

Keterangan:

*) Diisi dengan pilihan berikut:

1. Kolom identitas tidak diisi lengkap
2. Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
3. Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

H. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPH PASAL 4(2)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(4)
Lampiran :(3)
Hal : **Permintaan Kelengkapan
SPT Masa PPh Pasal 4(2)**

Yth.
NPWP :(5)

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPh Pasal 4(2) yang disampaikan pada tanggal(6) ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Lampiran yang disyaratkan

- a. Bukti pembayaran PPh Pasal 4(2);
- b. Daftar bukti pemotongan;
- c. Bukti pemotongan;
- d. *Fotocopy* Surat Kuasa Khusus;
- e. Daftar nilai penjualan saham per hari bursa;
- f. Daftar nilai penjualan obligasi per hari;
- g. Daftar perantara pedagang efek pemungut PPh.

2. Lain-Lain

- a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (....)";
- b. Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan melampirkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT, sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Masa dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Masa PPh Pasal 4(2) yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.(7) pada nomor telepon:(8)

Kepala Kantor,

.....(9)

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp. : KP.xx/KP.xxxx/xxxx

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPH PASAL 4(2)

- Angka (1) : diisi sesuai dengan format Kepala Naskah Dinas.
- Angka (2) : diisi dengan nomor Surat Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPh Pasal 4(2).
- Angka (3) : diisi dengan keterangan jumlah SPT/berkas yang dilampirkan.
- Angka (4) : diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPh Pasal 4(2).
- Angka (5) : diisi dengan Nama, NPWP, dan Alamat Wajib Pajak.
- Angka (6) : diisi dengan tanggal pengiriman pada bukti pengiriman surat melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir.
- Angka (7) : diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian.
- Angka (8) : diisi dengan nomor telepon kantor dan nomor ekstensi Petugas yang melakukan penelitian.
- Angka (9) : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor.

Keterangan:

*) Diisi dengan pilihan berikut:

1. Kolom identitas tidak diisi lengkap
2. Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
3. Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

I. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPN (PEMUNGUT)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(4)
Lampiran :(3)
Hal : **Permintaan Kelengkapan
SPT Masa PPN (Pemungut)**

Yth.
NPWP :(5)

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPN yang disampaikan pada tanggal(6) ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

- a. 1107 PUT 1
- b. 1107 PUT 2

2. Lampiran yang disyaratkan

- a. Bukti pembayaran PPN;
- b. Surat keterangan tidak dipungut/dibebaskan;
- c. Daftar Rincian Kendaraan Bermotor;
- d. *Fotocopy* Surat Kuasa Khusus;

3. Lain-Lain

- a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (....)*;
- b. Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan melampirkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT, sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Masa dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Masa PPN yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.(7) pada nomor telepon:(8)

Kepala Kantor,

.....(9)

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp. : KP.xx/KP.xxxx/xxxx

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPN (PEMUNGUT)

- Angka (1) : diisi sesuai dengan format Kepala Naskah Dinas.
- Angka (2) : diisi dengan nomor Surat Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPN (Pemungut).
- Angka (3) : diisi dengan keterangan jumlah SPT/berkas yang dilampirkan.
- Angka (4) : diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPN (Pemungut).
- Angka (5) : diisi dengan Nama, NPWP, dan Alamat Wajib Pajak.
- Angka (6) : diisi dengan tanggal pengiriman pada bukti pengiriman surat melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir.
- Angka (7) : diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian.
- Angka (8) : diisi dengan nomor telepon kantor dan nomor ekstensi Petugas yang melakukan penelitian.
- Angka (9) : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor.

Keterangan:

*) Diisi dengan pilihan berikut:

1. Kolom identitas tidak diisi lengkap
2. Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
3. Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

J. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPN 1111



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(4)
Lampiran :(3)
Hal : **Permintaan Kelengkapan
SPT Masa PPN 1111**

Yth.
NPWP :(5)

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPN yang disampaikan pada tanggal(6) ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

- a. 1111 AB
- b. 1111 A1
- c. 1111 A2
- d. 1111 B1
- e. 1111 B2
- f. 1111 B3

2. Lampiran yang disyaratkan

- a. Bukti pembayaran PPN;
- b. Surat keterangan tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung pemerintah;
- c. Daftar Rincian Kendaraan Bermotor;
- d. *Fotocopy* Surat Kuasa Khusus;

3. Lain-Lain

- a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (...)*;
- b. Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan melampirkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT, sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Masa dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Masa PPN yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.(7) pada nomor telepon:(8)

Kepala Kantor,

.....(9)

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp. : KP.xx/KP.xxxx/xxxx

DISTRIBUSI II

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPN 1111

- Angka (1) : diisi sesuai dengan format Kepala Naskah Dinas.
- Angka (2) : diisi dengan nomor Surat Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPN 1111.
- Angka (3) : diisi dengan keterangan jumlah SPT/berkas yang dilampirkan.
- Angka (4) : diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPN 1111.
- Angka (5) : diisi dengan Nama, NPWP, dan Alamat Wajib Pajak.
- Angka (6) : diisi dengan tanggal pengiriman pada bukti pengiriman surat melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir.
- Angka (7) : diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian.
- Angka (8) : diisi dengan nomor telepon kantor dan nomor ekstensi Petugas yang melakukan penelitian.
- Angka (9) : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor.

Keterangan:

*) Diisi dengan pilihan berikut:

1. Kolom identitas tidak diisi lengkap
2. Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
3. Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

K. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPN DM



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(4)
Lampiran :(3)
Hal : **Permintaan Kelengkapan
SPT Masa PPN DM**

Yth.
NPWP :(5)

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPN DM yang disampaikan pada tanggal(6) ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. **Formulir Baku**
 - a. 1111 A DM
 - b. 1111 R DM
2. **Lampiran yang disyaratkan**
 - a. Bukti pembayaran PPN DM;
 - b. Surat keterangan tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung pemerintah;
 - c. Daftar Rincian Kendaraan Bermotor;
 - d. *Fotocopy* Surat Kuasa Khusus;
3. **Lain-Lain**
 - a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (....)*;
 - b. Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan melampirkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT, sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Masa dalam waktu sebagaimana tersebut di atas maka SPT Masa PPN DM yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.(7) pada nomor telepon:(8)

Kepala Kantor,

.....(9)

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp. : KP.xx/KP.xxxx/xxxx

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPN DM

- Angka (1) : diisi sesuai dengan format Kepala Naskah Dinas.
- Angka (2) : diisi dengan nomor Surat Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPN DM.
- Angka (3) : diisi dengan keterangan jumlah SPT/berkas yang dilampirkan.
- Angka (4) : diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Masa PPN DM.
- Angka (5) : diisi dengan Nama, NPWP, dan Alamat Wajib Pajak.
- Angka (6) : diisi dengan tanggal pengiriman pada bukti pengiriman surat melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir.
- Angka (7) : diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian.
- Angka (8) : diisi dengan nomor telepon kantor dan nomor ekstensi Petugas yang melakukan penelitian.
- Angka (9) : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor.

Keterangan:

*) Diisi dengan pilihan berikut:

1. Kolom identitas tidak diisi lengkap
2. Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
3. Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

L. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT 1770



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(4)
Lampiran :(3)
Hal : **Permintaan Kelengkapan
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770)**

Yth.
NPWP :(5)

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (formulir 1770) yang disampaikan pada tanggal(6) ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

- a. 1770-I hal. 1
- b. 1770-I hal. 2
- c. 1770-II
- d. 1770-III
- e. 1770-IV

2. Lampiran yang disyaratkan

- a. SSP Lembar Ke-3 PPh Pasal 29;
- b. Neraca dan Laporan Rugi Laba;
- c. Rekapitulasi peredaran bruto dan/atau penghasilan lain dan biaya;
- d. Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha/gerai (Khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu);
- e. Fotokopi formulir 1721-A1 dan/atau 1721 A2 atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lain;
- f. Surat Kuasa Khusus beserta lampiran yang dipersyaratkan;
- g. Surat keterangan kematian;
- h. Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya;
- i. Penghitungan Kompensasi Kerugian;
- j. Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT);
- k. Bukti pemotongan/pemungutan oleh pihak lain/Ditanggung Pemerintah dan yang dibayar/dipotong di luar negeri;
- l. Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No.23 Tahun 2018 (bagi Wajib Pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP No.23 Tahun 2018)

3. Lain-Lain

- a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (...)?;
- b. Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan melampirkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT, sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.(7) pada nomor telepon:(8)

Kepala Kantor,

.....(9)

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp. : KP.xx/KP.xxxx/xxxx

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT TAHUNAN PPH
ORANG PRIBADI (1770)

- Angka (1) : diisi sesuai dengan format Kepala Naskah Dinas.
- Angka (2) : diisi dengan nomor Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770).
- Angka (3) : diisi dengan keterangan jumlah SPT/berkas yang dilampirkan.
- Angka (4) : diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770).
- Angka (5) : diisi dengan Nama, NPWP, dan Alamat Wajib Pajak.
- Angka (6) : diisi dengan tanggal pengiriman pada bukti pengiriman surat melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir.
- Angka (7) : diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian.
- Angka (8) : diisi dengan nomor telepon kantor dan nomor ekstensi Petugas yang melakukan penelitian.
- Angka (9) : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor.

Keterangan:

*) Diisi dengan pilihan berikut:

1. Kolom identitas tidak diisi lengkap
2. Kolom Tahun Pajak tidak diisi lengkap
3. Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

M. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT 1770 S



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(4)
Lampiran :(3)
Hal : **Permintaan Kelengkapan
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770 S)**

Yth.
NPWP :(5)

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (formulir 1770 S) yang disampaikan pada tanggal(6) ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. **Formulir Baku**
 - a. 1770 S-I
 - b. 1770 S-II
2. **Lampiran yang disyaratkan**
 - a. SSP Lembar Ke-3 PPh Pasal 29;
 - b. Fotokopi formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lain;
 - c. Surat Kuasa Khusus beserta lampiran yang dipersyaratkan;;
 - d. Surat keterangan kematian;
 - e. Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya;
3. **Lain-Lain**
 - a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (....)*;
 - b. Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan melampirkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT, sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.(7) pada nomor telepon:(8)

Kepala Kantor,

.....(9)

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp. : KP.xx/KP.xxxx/xxxx

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT TAHUNAN
PPH ORANG PRIBADI (1770S)

- Angka (1) : diisi sesuai dengan format Kepala Naskah Dinas.
- Angka (2) : diisi dengan nomor Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770S).
- Angka (3) : diisi dengan keterangan jumlah SPT/berkas yang dilampirkan.
- Angka (4) : diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770S).
- Angka (5) : diisi dengan Nama, NPWP, dan Alamat Wajib Pajak.
- Angka (6) : diisi dengan tanggal pengiriman pada bukti pengiriman surat melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir.
- Angka (7) : diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian.
- Angka (8) : diisi dengan nomor telepon kantor dan nomor ekstensi Petugas yang melakukan penelitian.
- Angka (9) : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor.

Keterangan:

*) Diisi dengan pilihan berikut:

1. Kolom identitas tidak diisi lengkap
2. Kolom Tahun Pajak tidak diisi lengkap
3. Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

N. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT 1770 SS



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....(1)

Nomor :(2)(4)
Lampiran :(3)
Hal : **Permintaan Kelengkapan**
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770 SS)

Yth.
NPWP :(5)

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (formulir 1770 SS) yang disampaikan pada tanggal(6) ternyata masih harus dilengkapi dengan:

1. Lampiran yang disyaratkan

- a. Surat Kuasa Khusus beserta lampiran yang dipersyaratkan;;
- b. Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) (Jika SPT menyatakan Kurang Bayar).

2. Lain-Lain

- a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (....)*;
- b. Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan melampirkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT, sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.(7) pada nomor telepon:(8)

Kepala Kantor,

.....(9)

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp. : KP.xx/KP.xxxx/xxxx

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT TAHUNAN PPH
ORANG PRIBADI (1770SS)

- Angka (1) : diisi sesuai dengan format Kepala Naskah Dinas.
- Angka (2) : diisi dengan nomor Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770SS).
- Angka (3) : diisi dengan keterangan jumlah SPT/berkas yang dilampirkan.
- Angka (4) : diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770SS).
- Angka (5) : diisi dengan Nama, NPWP, dan Alamat Wajib Pajak.
- Angka (6) : diisi dengan tanggal pengiriman pada bukti pengiriman surat melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir.
- Angka (7) : diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian.
- Angka (8) : diisi dengan nomor telepon kantor dan nomor ekstensi Petugas yang melakukan penelitian.
- Angka (9) : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor.

Keterangan:

*) Diisi dengan pilihan berikut:

1. Kolom identitas tidak diisi lengkap
2. Kolom Tahun Pajak tidak diisi lengkap
3. Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

O. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT 1771



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(4)
Lampiran :(3)
Hal : **Permintaan Kelengkapan
SPT Tahunan PPh Badan (1771)**

Yth.
NPWP :(5)

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Badan (formulir 1771) yang disampaikan pada tanggal(6) ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

- a. 1771 hal. 2
- b. 1771-I
- c. 1771-II
- d. 1771-III
- e. 1771-IV
- f. 1771-V
- g. 1771-VI

2. Lampiran yang disyaratkan

- a. SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29;
- b. Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- c. Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi;
- d. SSP PPh Pasal 26 ayat (4);
- e. Surat Kuasa Khusus beserta lampiran yang dipersyaratkan;;
- f. Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No.23 Tahun 2018 (*bagi Wajib Pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP No.23 Tahun 2018*)

3. Lampiran Khusus

- a. 1A :Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal;
- b. 2A :Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal;
- c. 3A, 3A-1 & A-2 : Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara *Tax Haven Country*;
- d. 4A :Daftar Fasilitas Penanaman Modal;
- e. 5A :Daftar Cabang Utama Perusahaan;
- f. 6A :Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4);
- g. 7A :Kredit Pajak Luar Negeri;
- h. 8A-1/8A-2/8A-3/8A-5/8A-6/8A-7/8A-8 : Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan.

4. Lain-Lain

- a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (...)*;
- b. Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan melampirkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT, sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.(7) pada nomor telepon:(8)

Kepala Kantor,

.....(9)

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp. : KP.xx/KP.xxxx/xxxx

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT TAHUNAN PPH BADAN (1771)

- Angka (1) : diisi sesuai dengan format Kepala Naskah Dinas.
- Angka (2) : diisi dengan nomor Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan PPh Badan (1771).
- Angka (3) : diisi dengan keterangan jumlah SPT/berkas yang dilampirkan.
- Angka (4) : diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan PPh Badan (1771).
- Angka (5) : diisi dengan Nama, NPWP, dan Alamat Wajib Pajak.
- Angka (6) : diisi dengan tanggal pengiriman pada bukti pengiriman surat melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir.
- Angka (7) : diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian.
- Angka (8) : diisi dengan nomor telepon kantor dan nomor ekstensi Petugas yang melakukan penelitian.
- Angka (9) : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor.

Keterangan:

*) Diisi dengan pilihan berikut:

1. Kolom identitas tidak diisi lengkap
2. Kolom Tahun Pajak tidak diisi lengkap
3. Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

P. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT 1771\$



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

Nomor :(2)(4)
Lampiran :(3)
Hal : **Permintaan Kelengkapan
SPT Tahunan PPh Badan yang Menggunakan
Mata Uang US Dollar (1771 \$)**

Yth.
NPWP :(5)
.....

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Badan (formulir 1771 \$) yang disampaikan pada tanggal(6) ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

- a. 1771/\$ hal.2
- b. 1771-I/\$
- c. 1771-II/\$
- d. 1771-III/\$
- e. 1771-IV/\$
- f. 1771-V/\$
- g. 1771-VI/\$

2. Lampiran yang disyaratkan

- a. SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29;
- b. Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- c. Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi;
- d. SSP PPh Pasal 26 ayat (4);
- e. Surat Kuasa Khusus beserta lampiran yang dipersyaratkan.

3. Lampiran Khusus

- a. 1B : Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal;
- b. 2B :Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal;
- c. 3B, 3B-1 & B-2 : Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara *Tax Haven Country*;
- b. 4B : Daftar Fasilitas Penanaman Modal;
- c. 5B : Daftar Cabang Utama Perusahaan;
- d. 6B :Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4);
- e. 7B : Kredit Pajak Luar Negeri;
- f. 8B-1/8B-2/8B-3/8B-5/8B-6/8B-7/8B-8: Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan.

4. Lain-Lain

- a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (....)*);
- b. Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan melampirkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT, sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.(7) pada nomor telepon:(8)

Kepala Kantor,

.....(9)

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp. : KP.xx/KP.xxxx/xxxx

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT TAHUNAN PPH BADAN YANG
MENGUNAKAN MATA UANG US DOLLAR (1771\$)

- Angka (1) : diisi sesuai dengan format Kepala Naskah Dinas.
- Angka (2) : diisi dengan nomor Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan PPh Badan yang Menggunakan Mata Uang US Dollar (1771\$).
- Angka (3) : diisi dengan keterangan jumlah SPT/berkas yang dilampirkan.
- Angka (4) : diisi dengan tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan PPh Badan yang Menggunakan Mata Uang US Dollar (1771\$).
- Angka (5) : diisi dengan Nama, NPWP, dan Alamat Wajib Pajak.
- Angka (6) : diisi dengan tanggal pengiriman pada bukti pengiriman surat melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir.
- Angka (7) : diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian.
- Angka (8) : diisi dengan nomor telepon kantor dan nomor ekstensi Petugas yang melakukan penelitian.
- Angka (9) : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor.

Keterangan:

*) Diisi dengan pilihan berikut:

1. Kolom identitas tidak diisi lengkap
2. Kolom Tahun Pajak tidak diisi lengkap
3. Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

Q. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

.....(1)

Nomor :(2)(4)
Lampiran :(3)
Hal : Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak
Disampaikan

Yth.
NPWP :(5)
.....

Berdasarkan Pasal 3 ayat (7) dan ayat (7a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, SPT(6) Masa/Tahun Pajak(7) yang telah Saudara sampaikan pada tanggal(8), kami anggap tidak disampaikan karena
.....(9)

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....(10)

Kp. : KP.xx/KP.xxxx/xxxx

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN

- Angka (1) : diisi sesuai dengan format Kepala Naskah Dinas.
Angka (2) : diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Status Penyampaian SPT.
Angka (3) : diisi dengan keterangan jumlah SPT/berkas yang dilampirkan.
Angka (4) : diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Status Penyampaian SPT.
Angka (5) : diisi dengan Nama, NPWP, dan Alamat Wajib Pajak.
Angka (6) : diisi dengan jenis SPT.
Angka (7) : diisi dengan Masa/Tahun Pajak.
Angka (8) : diisi dengan tanggal pengiriman pada bukti pengiriman surat melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir.
Angka (9) : diisi dengan alasan meliputi:
a. Saudara menyampaikan SPT yang tidak ditandatangani;
b. Saudara menyampaikan SPT dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah namun belum mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain Rupiah;
c. Saudara menyampaikan SPT dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah namun telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain Rupiah
d. Saudara menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Saudara telah ditegur secara tertulis; atau
e. Saudara menyampaikan SPT setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.
Angka (10): diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

u.b.

ttd.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ROBERT PAKPAHAN

ODING RIFALDI

NIP 19700311 199503 1 002

DISTRIBUSI II

